

**KONFLIK ELIT LOKAL DALAM MENENTUKAN PEMERINTAH  
NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik*

*Tesis*



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018**

## Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai bentuk pengakuan Pusat terhadap Daerah, memberikan peluang bagi elit lokal untuk menentukan pilihan berdesa, berdesa adat atau kelurahan. Di aras lokal Minangkabau, peluang tersebut meniscayakan terjadinya dualitas kepentingan politik, sebab di Minangkabau terdapat dua kelompok elit yang memiliki otoritas untuk menentukan bentuk sistem pemerintahan. Elit yang dimaksud adalah elit adat atau ninik mamak dan elit pemerintahan atau elit non-ninik mamak. Dualitas kepentingan tersebut otomatis mendorong terjadinya tarik menarik kepentingan dalam pilihan antara nagari berbasis administrasi dengan nagari berbasis adat (desa adat dengan desa administratif). Studi ini berupaya untuk menyelidiki bagaimana bentuk tarik menarik kepentingan tersebut. Untuk melihat pertarungan tersebut maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa memang tarik menarik tersebut dilandasi oleh adanya dua kepentingan, yakni antara kepentingan filosofis dan kepentingan pragmatis. Tetapi, lebih dari itu, pada dasarnya yang diperebutkan oleh elit lokal tersebut adalah legitimasi dan otoritas. Ninik mamak yang selama ini tersingkirkan oleh otoritas birokrasi (pemerintahan), kembali memperoleh ruang untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas di tingkat lokal. Dapat dikatakan pertarungan elit lokal tersebut bukanlah tentang bagaimana menciptakan sistem pemerintahan yang tepat, melainkan tentang bagaimana pilihan berdesa atau berdesa adat dapat dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat.

Keyword: *Elit Lokal, UU No 6 2014, Kepentingan Politik*



## Abstract

The presence of Law No. 6 of 2014 on *desa* as a form of recognition of the Central to the Regions, provides an opportunity for local elites to determine election *berdesa*, *berdesa adat* or *kelurahan*. At the local level of Minangkabau, such opportunities entail the duality of political interests, because in Minangkabau there are two elite groups that have the authority to determine the shape of the system of government. The elites here are elite of *adat* or *ninik mamak* and elite of government or *non-ninik mamak*. This duality of interests automatically encourages the attraction of interests between the choice of administrative *desa* or *desa adat*. This study aims to inquiry the attraction of interest. To see the attraction, the method used is a qualitative method with a case study approach. The results of this study indicate that indeed the attraction is based on the existence of two interests; between philosophical interests and pragmatic interests. But more than that, basically what the local elite contested is legitimacy and authority. *Ninik mamak* that had been excluded by bureaucratic or governmental authorities got a chance again to gain legitimacy and authority at the local level. It can be said that the struggle of the local elite is not about how to create the right government system, but about how the choice of administrative *desa* or *desa adat* can be utilized to gain recognition in society.

**Keyword:** *Local Elites, Law No. 6 of 2014, Political Interest*

